



BPPSDMP



LAKIN BPPSDMP



2
0
2
4



BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website : <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TA 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2025



Inspektur II,

Memet Darmawan, S.TP, MP
NIP. 197205292002121001



KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pertanian, sebagaimana diubah menjadi menjadi Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pertanian, dimana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertanian pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2024.

Jakarta, 7 Januari 2025
Kepala Badan PPSDMP



Dr. Idris Widi Arsanti, SP, MP
NIP. 19730114 199903 2 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja atau Lakin Badan PPSDMP tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020 - 2024 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Lakin Badan PPSDMP tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2024.

Lakin ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2024 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2020-2024, Visi Badan PPSDMP adalah : **"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern"**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah: Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Persentase petani yang menerapkan teknologi; 2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; 3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian bekerja di bidang pertanian; 5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP; 6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2024 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dari target 90% dengan realisasi 90,24% dan capaian sebesar



100,27%; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dari target 90% dengan realisasi 97,50% dan capaian sebesar 108,33%; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dari target 90% dengan realisasi 91,30% dan capaian sebesar 101,44%; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dari target 22 dengan realisasi 22,10 dan capaian sebesar 100,44% sebesar 100,28%; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP dari target 77,96% dengan realisasi 80,08% dan capaian sebesar 102,71%; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dari target 94,09% dengan realisasi 95,16 dan capaian sebesar 101,14%.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2024 adalah Rp. 1.164.906.631.295,- dari pagu sebesar Rp. 1.188.973.395.000,- Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2024 adalah 97,98%. Jika dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 143.297.729.793,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 289.768.877.766,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 433.291.319.205,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 298.538.704.531,-.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	5
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2024..	6
E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2024.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	27
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2024.....	27
1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2024.....	28
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP empat tahun 2020–2024.....	46
3 Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 s.d. 2024)	48
4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	49
5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	50
6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	64
C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2024.....	67
D. Kinerja Lainnya.....	71
BAB IV. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerja.	76
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP berdasarkan Golongan Tahun 2024	7
Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	7
Tabel 3. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2024.....	8
Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP.....	12
Tabel 5. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi.....	22
Tabel 6. Target Kinerja dan Anggaran BPPSDMP 2020 – 2024.....	24
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2024.....	26
Tabel 8. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2024.....	27
Tabel 9. Data Jumlah Poktan dan Petani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	31
Tabel 10. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2024.....	33
Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian tahun 2024.....	34
Tabel 12. Data Rekapitulasi Kelembagaan Ekonomi Petani	39
Tabel 13. Realisasi Kinerja BPPSDMP 2020-2024	46
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja BPPSDMP Pada Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra (2020 s.d. 2024).....	48
Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2024	68
Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2024	69
Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2024	69
Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2024.....	70
Tabel 19. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2024.....	70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Transformasi Kelembagaan Petani.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian guna mendukung pembangunan sektor pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPSDMP secara konsisten mengembangkan program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang berorientasi pada kebutuhan industri, petani, serta tenaga pendamping di sektor pertanian.

Pada tahun 2024, BPPSDMP menjadikan inovasi dan digitalisasi sebagai fokus utama dalam mengakselerasi program kerja. Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, serta dinamika ekonomi yang terus berkembang, BPPSDMP dituntut untuk semakin adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas capaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2024 serta sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan.

Sepanjang tahun 2024, BPPSDMP menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi program dan kegiatan, di antaranya adalah transformasi digital dalam penyuluhan dan pelatihan, keterbatasan sumber daya, sinergi dengan pemangku kepentingan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyuluhan dan pelatihan menuntut tersedianya infrastruktur yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga pendukung juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi program di berbagai daerah. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

daerah, akademisi, serta sektor swasta menjadi sangat penting guna memastikan keberlanjutan pembangunan SDM pertanian. Lebih lanjut, BPPSDMP perlu mengembangkan strategi pelatihan yang mampu membekali petani dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan pola produksi pertanian.

Sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian, BPPSDMP memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPPSDMP telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP 2020-2024, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM pertanian. BPPSDMP memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan SDM pertanian. Dari sisi kekuatan, BPPSDMP memiliki kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang telah tersedia dengan dukungan tenaga penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru yang kompeten, serta didukung oleh regulasi yang mengakomodasi penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian.

Namun, BPPSDMP juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani, tingkat pendidikan petani yang masih rendah, serta kapasitas kelembagaan petani yang belum optimal. Selain itu, minat generasi muda terhadap sektor pertanian yang cenderung menurun serta keterbatasan jumlah SDM pertanian yang kompeten menjadi tantangan tersendiri dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih maju. Tidak hanya itu, belum optimalnya keterkaitan antara kebutuhan dunia usaha dan industri dengan ketersediaan tenaga kerja pertanian juga menjadi kendala yang perlu diatasi agar lulusan sektor pertanian dapat terserap secara maksimal di dunia kerja.

Di sisi lain, BPPSDMP memiliki peluang besar dalam peningkatan pengembangan SDM pertanian, antara lain melalui peningkatan volume



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

ekspor komoditas pangan strategis, pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi, serta akses yang semakin luas bagi petani milenial terhadap pembiayaan, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan. Bonus demografi dan peluang pemanfaatan teknologi industri 4.0 juga menjadi faktor pendukung yang dapat mempercepat transformasi sektor pertanian di Indonesia.

Meskipun demikian, BPPSDMP juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, seperti produktivitas dan daya saing komoditas pertanian yang belum optimal, tingginya tingkat pengangguran terbuka, serta dampak ekonomi global yang berpengaruh terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta bencana alam menjadi faktor lain yang harus diantisipasi dalam pengembangan SDM pertanian. Selain itu, kesiapan SDM pertanian dalam menghadapi era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) juga menjadi isu yang perlu ditangani secara serius melalui program peningkatan kompetensi dan keterampilan yang berkelanjutan.

Sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran kebijakan BPPSDMP jangka menengah, program aksi yang telah dilaksanakan mencakup tiga fokus utama, yaitu Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan vokasi untuk mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial, serta penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan vokasi guna mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Peningkatan kualitas SDM pertanian menjadi fokus utama dari ketiga pilar BPPSDMP, yakni penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Diharapkan Sektor Pertanian dapat lebih berdaya saing dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. BPPSDMP terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan strategi yang efektif dalam mencetak SDM pertanian yang



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

mampu menghadapi tantangan dan dinamika global yang terus berkembang.

Dari sisi kelembagaan, BPPSDMP memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP. Selain itu, BPPSDMP juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjineri Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP). Dengan jaringan kelembagaan yang luas ini, BPPSDMP dapat lebih optimal dalam melaksanakan program-program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan kinerja BPPSDMP tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi dalam mendukung pembangunan SDM pertanian, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi program BPPSDMP. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program di tahun-tahun mendatang. Dengan adanya laporan ini, pembangunan SDM pertanian diharapkan dapat semakin terarah, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sektor pertanian di Indonesia secara lebih efektif dan efisien.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BPPSDMP.

Tugas BPPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh BPPSDMP meliputi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
6. pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II Pusat dan 20 UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat BPPSDMP.
5. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
11. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tangerang Banten;
12. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi Jawa Barat;
13. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
16. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
20. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi;
21. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

D. Sumber Daya Manusia BPPSDMP Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 BPPSDMP didukung oleh 1.746 orang aparatur yang terdiri atas 1.004 orang aparatur laki-laki dan 742 aparat perempuan.



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Komposisi pegawai BPPSDMP pada tahun 2024 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 9 orang; golongan II yaitu 211 orang; golongan III yaitu 1.168 orang, dan golongan IV yaitu 358 orang. Persentase pegawai BPPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 66,90%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 0,52%. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2024 pada berdasarkan golongan pada tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	9	0,52
2	Golongan II	211	12,08
3	Golongan III	1168	66,90
4	Golongan IV	358	20,50
		1746	100,00

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

2. Rincian menurut pendidikan yang tertinggi yaitu : S2 (magister) dengan jumlah 660 orang dan yang terendah yaitu D2 dan D1 dengan jumlah yaitu masing-masing 1 orang. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2024 pada berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Peresentase
1	S3	148	8,48
2	S2	660	37,80
3	S1	438	25,09
4	D4	112	6,41
5	D3	89	5,10
6	D2	1	0,06
7	D1	1	0,06
8	SLTA	240	13,75
9	SLTP	28	1,60
10	SD	29	1,66
		1746	100,00

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024



E. Dukungan Anggaran BPPSDMP Tahun 2024

Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2024 adalah **RP. 1.188.973.395.000**;
Rincian Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2024 terdiri dari anggaran pada
table 3:

Tabel 3. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2024

No	Kegiatan	PAGU (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	296.897.394.000	24,97
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	146.129.703.000	12,29
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	440.305.237.000	37,03
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	305.641.061.000	25,71
	TOTAL	1.188.973.395.000	100,00

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2024 mulai dari yang tertinggi yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 37,03%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 25,71%, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 24,97%, dan terendah adalah Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 12,29%.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 226/Kpts/RC.020/I/10/2021. Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 278/Kpts/RC.020/I/11/2020 tentang Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024.

1. Visi

BPPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Adapun pokok-pokok visi BPPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. **SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk



meraih kesuksesan. **SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha** adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *entrepreneurship*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. **Pertanian Maju** dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. **Pertanian Mandiri** dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. **Pertanian Modern** diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

2. Misi

BPPSDMP menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;



- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- c. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- d. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen) ;
- b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen) ;
- c. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang) ;

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya dengan target 18 % (th. 2020) sampai dengan 22 % (th. 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat



kapasitasnya dengan target 60 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).

3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (th 2020) sampai dengan nilai 77,96 (th. 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (th. 2020) sampai dengan 94,09 (th. 2024).

4. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
2.		2.	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)



	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	3.	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4.	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5.	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP (Nilai)
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

5. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

6. Strategi

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata



Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

a. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- 1) Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- 2) Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- 3) Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
- 4) Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP
- 5) Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- 6) Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.

b. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:



1) Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dengan langkah operasional sebagai berikut:

- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
- Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
- Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
- Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode *online* dan *offline* berbasis NIK;
- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
- Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
- Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
- Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
- Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.
- Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
- Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S
- Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan;



2) Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:

- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
- Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
- Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
- Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
- Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
- Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
- Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA)
- Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial;

3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:

- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
- Pengembangan *database* kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
- Pengembangan *database* petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
- Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
- Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian.



- Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- 4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian;
- 5) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;



- Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP
- 6) Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan *stakeholder* pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: a) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; b) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; c) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan



wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); d) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan e) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dan pengendali yang mempercepat pengambilan keputusan dibidang pembangunan pertanian dan pangan.

7) Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan



dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (a) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (a) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (b) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (c) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (d) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (e) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan



benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

c. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- 4) Transformasi pelayanan publik, melalui: – Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.



7. Program

Pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I, BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan
- b. Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan).

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi II menjadi yaitu:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- b. Program Dukungan Manajemen;

Program Aksi BPPSDMP meliputi: (a). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian; (b). Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; (c). Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi Pendidikan, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan	Fungsi
Kegiatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan



Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi
--------------------	--	---------

8. Kegiatan Utama BPPSDMP

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi :

- a. Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- b. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- c. Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- d. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- f. Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri : *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*, Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI, Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*, Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.
- g. Program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan program PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri).

9. Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020-2024

Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP Tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 6.



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 6. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PERTANIAN								993.176	985.265	754.176	1.884.286	2.261.143	BPPSDMP
SP1	Termanfaatkannya teknologi pertanian												
	IKSP1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SP2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia												
	IKSP2	Persentase sumber daya manusia pertanian yang	%	60	75	80	85	90					
	IKSP3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di	%	65	75	80	85	90					
SP3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional												
	IKSP4	Persentase kelembagaan petani	%	18	19	20	21	22					
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian								489.612	479.693	298.663	800.607	960.728	Pusat Penyuluhan Pertanian
SK1	Pemanfaatan teknologi pertanian												
	IKSK1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui												
	IKSK2	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	18	19	20	21	22					
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian								181.703	154.268	58.823	308.959	370.751	Pusat Pelatihan Pertanian
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan												
	IKSK1	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat	%	60	75	80	85	90					
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian												
	IKSK2	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1-4)	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94					
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian								321.861	351.305	396.690	774.720	929.664	Pusat Pendidikan Pertanian
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian												
	IKSK1	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang	%	65	75	80	85	90					



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pendidikan pertanian													
	IKSK2	Persentase lembaga pendidikan vokasi	%	80	80	80	90	100						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan													
	IKSK3	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	BPPSDMP
SP1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	IKSP1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
SP2	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas													
	IKSP2	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	Sekretariat BPPSDMP
SK1	Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan													
	IKSK1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
	IKSK2	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal	Nilai	85	86	87	88	89						
	IKSK3	Level maturitas penyelenggaraan	Level	-	3	3	3	4						
	IKSK4	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BPPSDMP yang	%	70	75	80	85	90						
	IKSK5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan	%	75	80	85	90	90						
SK2	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP													
	IKSK6	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat BPPSDMP													
	IKSK7	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan sekretariat	Skala Likert (1-4)	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86						

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja BPPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala BPPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan tahun 2024 adalah :



Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	90%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	90%
		3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	90%
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	22%
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5	Presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab BPPSDMP	77,96 %
5	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Nilai)	94,09 Nilai

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Keragaan kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian menjadi empat kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2024.

Indikator kinerja BPPSDMP tahun 2024 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang paling tinggi adalah Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan capaian 115,95%. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	Capaian %	KATEGORI
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	A Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	90	90,24	100,27	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	B Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	90	97,50	108,33	Sangat Berhasil



		C	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	90	91,30	101,44	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	D	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	22	22,10	100,44	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	E	Presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP	77,96	80,08	102,71	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	F	Nilai IKPA BPPSDMP (Nilai)	94,09	95,16	101,14	Sangat Berhasil

Sumber data Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi dan teknologi pertanian berperan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang salah satunya dindikasikan dari meningkatkannya ketahanan pangan rumah tangga petani. Hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani apabila komponen teknologi yang dihasilkan diterapkan petani dalam pengelolaan usahatannya. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan.



Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan.

Proses penyebarluasan inovasi dan teknologi hasil pengkajian yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan petani yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai jembatan dalam penyebarluasan/ diseminasi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di pusat maupun daerah atau sumber lainnya kepada petani.

Penyuluh Pertanian berperan penting dalam memperkenalkan dan mendiseminasikan inovasi serta teknologi pertanian kepada petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian sehingga mampu meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya diindikasikan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadinya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha.



Berkenaan dengan hal itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penyuluhan Pertanian adalah Persentase Petani yang meningkat kapasitasnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian, diinformasikan bahwa didapatkan sebanyak **23.217.285 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terekam dalam **Aplikasi Simluhtan** pada periode tahun 2024.

Namun untuk pengumpulan data petani yang menerapkan teknologi dilaporkan setiap bulan oleh penyuluh melalui E-Pusluh. Laporan tersebut berisi terkait hasil kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan Diseminasi Teknologi terbaru melalui pertemuan-pertemuan dengan petani.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **90,24 persen** pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, IKU persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian ditargetkan mencapai **90 persen**. Dengan kata lain, target jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **20.895.55 petani** pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{\sum \text{total petanidi wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi tahun 2024, sebagai berikut:

$$= \frac{(20.951.646}{23.217.285)} \times 100\%$$



= **90,24%**

Nilai persentase capaian kinerja tahun 2024 yaitu:

= **(90,24/90) x 100**

= **100,27% (Sangat berhasil)**

Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi oleh **20.951.646 petani** sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan penyuluhan pertanian, diantaranya melalui pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi dengan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) dan Kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Metode Sekolah Lapang.

Tabel 9. Data Jumlah Poktan dan Petani yang Menerapkan
Teknologi Pertanian Bulan Desember 2024

No	Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Sasaran (Kelompok)	Jumlah Petani yang Menggunakan Teknologi				JUMLAH
			Tanaman Pangan	Hortikultura	Peternakan	Perkebunan	
1	ACEH	12.956	478.626	94.983	24.608	44.981	644.258
2	SUMATERA UTARA	17.458	621.917	122.260	56.940	54.976	856.123
3	SUMATERA BARAT	12.007	387.948	102.937	36.038	58.485	585.418
4	RIAU	4.910	293.318	55.342	6.514	16.983	376.168
5	JAMBI	7.002	190.967	75.467	13.992	60.205	340.681
6	SUMATERA SELATAN	14.385	453.583	135.189	37.588	119.010	745.420
7	BENGKULU	10.569	79.202	80.315	19.726	43.441	202.713
8	LAMPUNG	13.538	849.297	99.593	31.737	37.367	1.018.094
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.902	20.051	19.937	3.618	24.802	68.447
10	KEPULAUAN RIAU	266	9.306	452	400	34	10.245
11	DKI JAKARTA	2	0	0	0	0	-
12	JAWA BARAT	23.382	2.878.219	88.139	17.398	19.246	3.003.150
13	JAWA TENGAH	46.278	2.828.141	287.387	104.432	109.749	3.327.770
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.727	325.082	8.509	3.548	2.335	339.504
15	JAWA TIMUR	36.339	3.438.279	236.902	162.139	125.975	3.963.395
16	BANTEN	5.031	296.132	23.629	2.962	383	323.157
17	BALI	3.047	247.266	13.433	14.527	7.633	282.898
18	NUSA TENGGARA BARAT	20.141	616.606	66.998	61.925	6.259	751.848
19	NUSA TENGGARA TIMUR	18.840	273.941	151.399	83.841	54.821	564.032
20	KALIMANTAN BARAT	12.070	352.002	56.801	26.064	26.512	465.206
21	KALIMANTAN TENGAH	7.723	36.334	70.816	42.539	54.373	204.112
22	KALIMANTAN SELATAN	29.054	2.338	179.576	80.219	161.184	423.373
23	KALIMANTAN TIMUR	4.611	93.253	31.601	7.463	22.655	155.223
24	KALIMANTAN UTARA	2.064	12.534	8.259	11.221	8.070	40.113
25	SULAWESI UTARA	3.088	169.852	15.751	1.911	3.890	191.234
26	SULAWESI TENGAH	6.452	121.809	26.396	14.694	28.106	191.034
27	SULAWESI SELATAN	14.824	1.177.801	81.818	19.851	46.697	1.326.227
28	SULAWESI TENGGARA	8.233	103.469	31.982	12.560	22.231	170.272
29	GORONTALO	2.131	80.810	5.720	5.943	160	92.671
30	SULAWESI BARAT	2.021	160.574	6.656	1.162	5.901	174.263
31	MALUKU	2.098	13.216	30.484	3.478	3.478	50.685
32	MALUKU UTARA	3.587	22.138	12.104	5.310	5.675	45.258
33	PAPUA	1.044	13.157	13.813	428	999	28.427
34	PAPUA BARAT	0	2.583	3.826	1.056	0	7.294
35	PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0	-
36	PAPUA TENGAH	162	29	18	0	0	47
37	PAPUA PEGUNUNGAN	1	0	0	0	0	-
38	PAPUA BARAT DAYA	174	518	1.150	1.195	0	2.872
JUMLAH		350.727	16.629.098	2.222.432	919.747	1.178.783	20.951.646



b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya di lapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

**(Nilai((Σ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan):
(Σ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) \times 100%)**

Dalam mengumpulkan data SDM yang mengikuti Pelatihan dan SDM Pertanian yang menerapkan Materi Pelatihan sebelumnya digunakan aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK) yang bisa diakses oleh peserta pelatihan yang telah memiliki akun pada link <https://new-epik.puslatan.id/>. Namun selama tahun 2024 terjadi error website EPIK sehingga proses pengumpulan datanya dialihkan menggunakan Goolge Drive oleh masing-masing Unit Kerja Pelatihan.



Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2024

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan	%
1	BBPMKP CIAWI	2.880	2.867	99,55
2	BBPKH CINAGARA	2.563	2.480	96,76
3	BBPP LEMBANG	2.307	2.287	99,13
4	BBPP KETINDAN	5.484	5.484	100
5	BBPP BATU	2.106	2.087	99,15
6	BBPP BATANGKALUKU	9.343	9.000	96,33
7	BBPP BINUANG	1.171	1.090	93,08
8	BBPP KUPANG	1.390	1.295	93,17
9	BPP JAMBI	801	786	98,13
10	BPP LAMPUNG	791	740	93,55
TOTAL			28.836	28.116

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 6,541 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 6.967 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2024 adalah :

$$= (28.116 / 28.836) \times 100\% \\ = 97,50\%$$

Presentase capaian kinerja dihitung dari:

$$= (97,50 / 90) \times 100 \\ = 108,33\% \text{ (sangat berhasil)}$$



Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 97,50%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 108,33% (**sangat berhasil**).

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerjadibidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan dibidang pertanian. Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan yang dihitung dari Agustus n-1 sampai dengan Agustus tahun berjalan. Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian pada Tahun 2024 sudah 68,42% dari target 90%. Rekapitulasi Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja dibidang Pertanian diUPT pada tabel 10.

Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja dibidang Pertanian

No	Nama UPT	Jml Lulusan TA 2023	Jml Lulusan bekerja di pertanian	%
1.	Polbangtan Medan	340	309	90,88
2.	Polbangtan Bogor	550	498	90,55
3.	Polbangtan Yoma (Yogyakarta)	440	406	92,27
4.	Polbangtan Yoma (Magelang)	151	136	90,07
5.	Polbangtan Malang	446	408	91,48
6.	Polbangtan Gowa	491	447	91,04
7.	Polbangtan Manokwari	193	174	90,16
8.	PEPI	70	63	90,00



9	SMK-PP Sembawa	150	137	91,33
10	SMK-PP Banjarbaru	60	58	91,67
11	SMK-PP Kupang	63	61	96,83
	Total	2.945	2.697	91,30

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian adalah sebagai berikut:

Jumlah Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2023 s.d Agustus 2024) sebagai pembilang. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut. Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sebagai berikut :

= (Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan) / (Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan) x 100%

= 2697 / 2945 x 100%

= 91,30%

Persentase lulusan yang bekerja dibidang pertanian adalah:

= 91,30 / 90 x 100%

= 101,44% (sangat berhasil)

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni. Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain PNS Dinas Pertanian, Wirausaha Pertanian, Perusahaan Swasta dan BUMN yang bergerak dibidang pertanian (misalnya Perkebunan



Sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (Universitas Negeri/Swasta dan Politeknik Pertanian).

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMK-PP dan tersebar diberbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni; partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMK-PP dengan cara menyebar link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (*Whatapps, Facebook dan media lainnya*).

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

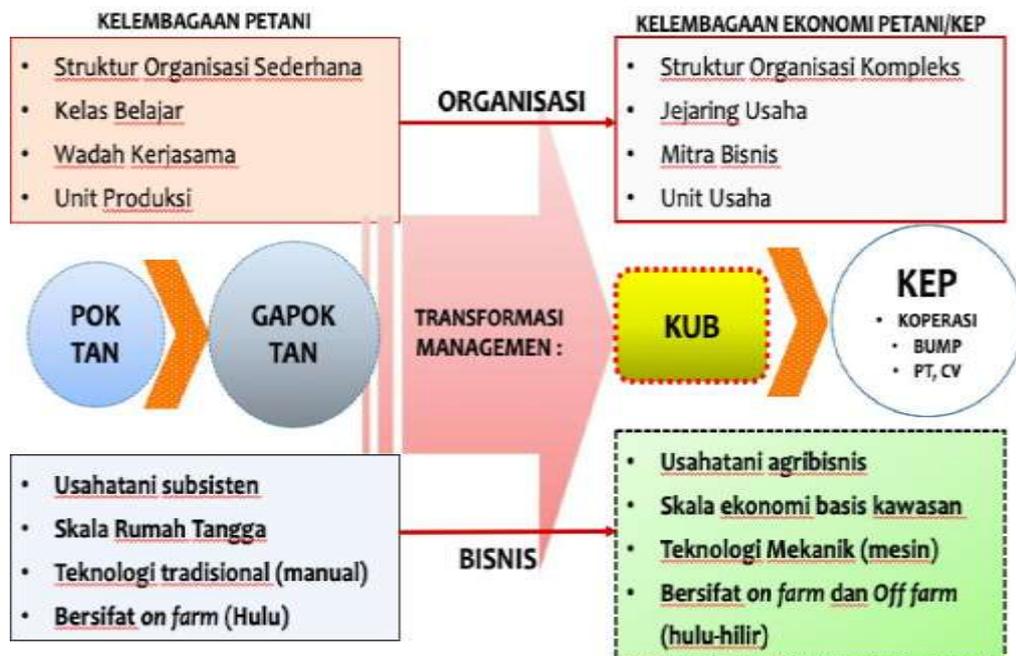


Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatani, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas.

Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 2.



Gambar 2. Transformasi Kelembagaan Petani

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- 1) Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- 2) Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- 3) Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- 4) Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- 5) Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
- 6) Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- 7) Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaanpetani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). IKU Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya tahun 2024 ditargetkan mencapai 22% dari jumlah Gapoktan yang terdata dalam aplikasi



SIMLUHTAN tahun 2024, yaitu sebanyak 14.301 KEP dari 64.723 gapoktan (meningkat 1% dari tahun 2024).

Tabel 12. Data Rekapitulasi Kelembagaan Ekonomi Petani

No	Provinsi	Jml KEP	Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya
1	Aceh	628	573		1	38	4	12
2	Sumatera Utara	599	267		1	257	24	50
3	Sumatera Barat	339	122			129	61	27
4	Riau	186	140		5	16	3	22
5	Jambi	331	125	1	1	140	44	20
6	Sumatera Selatan	757	184	1		167	76	329
7	Bengkulu	118	53	1		6	39	19
8	Lampung	261	112	4	1	43	47	54
9	Kepulauan Bangka Belitung	38	27	1		2	3	5
10	Kepulauan Riau	20	16			2	-	2
11	DKI Jakarta	6	6			-	-	-
12	Jawa Barat	1.560	407	4	7	627	221	294
13	Jawa Tengah	2.720	493	8		516	1.063	640
14	DI Yogyakarta	474	106	1		237	88	42
15	Jawa Timur	1.585	373	1	8	415	316	472
16	Banten	150	85		1	26	23	15
17	Bali	68	52		1	7	-	8
18	Nusa Tenggara Barat	658	331	2	2	180	72	71
19	Nusa Tenggara Timur	447	149		2	257	16	23
20	Kalimantan Barat	205	157		1	31	-	16
21	Kalimantan Tengah	153	74			31	7	41
22	Kalimantan Selatan	378	53		3	150	27	145
23	Kalimantan Timur	91	37	1	1	13	19	20
24	Kalimantan Utara	56	38		1	1	2	14
25	Sulawesi Utara	86	47		3	24	1	11
26	Sulawesi Tengah	213	160			19	5	29
27	Sulawesi Selatan	840	275		1	347	67	150
28	Sulawesi Tenggara	423	101	1	1	229	51	40
29	Gorontalo	48	24			13	1	10
30	Sulawesi Barat	746	439			279	3	25
31	Maluku	30	19			8	1	2
32	Maluku Utara	17	-	1		1	-	15
33	Papua Barat	22	14			8	-	-
34	Papua	48	4			39	1	4
		14.301	5.063	27	41	4.258	2.285	2.627



Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2024 secara kumulatif mencapai **14.272 KEP**. Adapun capaian kinerja utama "Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya" diukur dengan formula pengukuran:

$$= \frac{(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani})}{(\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan})} \times 100\%$$

Berdasarkan formula pengukuran IKU tersebut, capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada pada bulan Desember 2024, yaitu :

1. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan Bulan Desember 2024, sebagai berikut

$$= \frac{(14.301/64.723) \times 100\%}{}$$

$$= 22,10\%$$

2. Persentase capaian kinerja untuk Bulan Desember 2024 adalah :

$$= \frac{(22,10/22) \times 100}{}$$

$$= 100,44\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2024 adalah **22,10 %** dari target **22%** tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **100,44% (sangat berhasil)**.

Pencapaian keberhasilan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2024 (22,10%) dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian.



e. Presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi (RB) menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, terutama di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Untuk menguji sejauh mana keberhasilan rencana aksi (renaksi) RB tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, baik secara general maupun tematik. Evaluasi ini merupakan langkah kritis untuk menilai efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan serta efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. Reformasi birokrasi general dan tematik merupakan dua fokus dalam reformasi birokrasi yang dikenal dengan "*double track*". RB general berfokus pada perbaikan sistem dan tata Kelola internal instansi pemerintah, sedangkan RB tematik berfokus pada penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah.

Berdasarkan komponen penilaian dan metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa laporan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan Renaksi RB general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian, terutama di BPPSDMP.

Laporan evaluasi Renaksi Reformasi Birokrasi general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024 bertujuan untuk: (1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian RB di lingkup Kementerian Pertanian serta dampaknya terhadap



permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden; (2) Memonitor rencana aksi: tindak lanjut hasil evaluasi RB di lingkup Kementerian Pertanian; (3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB; dan (4) Menyusun profil nasional pelaksanaan RB.

Evaluasi renaksi RB general dan tematik dilakukan dengan menggunakan komponen penilaian yang terdiri dari:

a) Dimensi RB General:

- a. Capaian strategi pelaksanaan RB general;
 1. Sub komponen kualitas rencana aksi, serta
 2. Sub komponen implementasi rencana aksi
- b. Capaian implementasi kebijakan percepatan RB; dan
 1. 16 indikator pada Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif"
 2. 2 indikator pada Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"
- c. Capaian sarana strategis RB
 1. Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif": Indeks SPBE; Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan Capaian Akuntabilitas Keuangan.
 2. Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional": SPI; SKM; Indeks BerAKHLAK; dan *Employer Branding*.



b) Dimensi RB Tematik (untuk kementerian/lembaga):

- a. Capaian rencana aksi RB tematik; dan
- b. Capaian indikator dampak RB tematik
 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
 2. Peningkatan Realisasi Investasi;
 3. Tingkat Inflasi;
 4. Tingkat Penggunaan PDN; dan
 5. Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya.

Berdasarkan komponen penilaian dan metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa laporan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan Renaksi RB general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian, terutama di BPPSDMP.

Pencapaian keberhasilan presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP pada tahun 2024 adalah:

$$= (80,08 / 77,96) \times 100\%$$
$$= 102,71\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Target presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP tahun 2024 adalah 77,96% dengan realisasi 80,08%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP adalah 102,71% (**sangat berhasil**).

f. Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Nilai)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 mengatur *Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Tujuan utama IKPA adalah:

- Memperkuat prinsip *value for money* dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L);
 - Mendorong percepatan pelaksanaan anggaran dan pencapaian output yang terukur;
 - Mewujudkan perlakuan yang adil (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja di tingkat Satuan Kerja (Satker), Eselon I, dan K/L.
- Penilaian IKPA Tahun 2024 mencakup tiga aspek utama berikut:

1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, meliputi:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, meliputi lima indikator:
 - Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
 - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang diukur melalui:
 - Capaian Output

Penilaian IKPA Tahun 2024 mengalami reformulasi dengan beberapa perubahan signifikan, yaitu:

- Perubahan formula penilaian pada enam indikator, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM.
- Peningkatan bobot indikator Deviasi Halaman III DIPA, dari sebelumnya 10% menjadi 15%.



- Penggunaan metode rata-rata tertimbang untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran, yang memperhitungkan proporsi pagu berdasarkan jenis belanja.
- Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual.
- Penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP, dengan target penggunaan bertahap sebagai berikut:
 - Triwulan I: 1% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan,
 - Triwulan II: 5%,
 - Triwulan III: 9%,
 - Triwulan IV: 12,5%.

- Indikator Dispensasi SPM ditetapkan sebagai pengurang nilai IKPA di tingkat Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh Satker, Eselon I, dan K/L, sehingga mendukung kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.

Penilaian IKPA Tahun dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, mendorong capaian output yang optimal, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Target IKPA BPPSDMP tahun 2024 adalah 94,09. Realisasi IKPA BPPSDMP tahun 2024 adalah 95,16.

Capaian kinerja NKA BPPSDMP tahun 2024 :

$$= 95,16/94,09 \times 100 = \mathbf{101,14\%}$$

= 101,14% (Sangat Berhasil)



2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 5 (lima) tahun 2020–2024

Untuk mengetahui kecenderungan Realisasi Kinerja BPPSDMP mulai dari tahun 2020 – 2024 ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2020 - 2024

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,00	70,19	75,00	75,51	80,00	80,83	85,00	85,22	90	90,24
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	60,00	99,50	75,00	79,92	80,00	90,88	85,00	88,98	90	97,50
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	65,00	76,62	75,00	85,94	80,00	84,46	85,00	88,55	90	91,30
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	18,00	19,00	19,83	20,00	20,25	21,00	21,06	22	22,10
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	33,25	34,56	33,50	34,57	33,75	34,95	34,00	34,95	77,96	80,08
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,00	75,85	91,00	89,87	90,40	90,63	90,60	90,72	94,09	95,16

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2024

Tabel 13 menunjukkan hasil yang menarik dalam indikator kinerjanya. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi, yang mengalami peningkatan dari 70,19% di tahun 2020 menjadi 90,24% pada tahun 2024. Meskipun ada kemajuan, pencapaian ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengadopsi teknologi di kalangan petani masih perlu ditangani, terutama terkait aksesibilitas dan pemahaman terhadap manfaat teknologi baru.

Di sisi lain, Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan pencapaian 108,33% pada tahun 2024. Ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan



dan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang berhasil meningkatkan kapasitas banyak individu dalam sektor pertanian. Komitmen yang kuat dalam pengembangan SDM terbukti memberikan hasil yang melebihi harapan.

Selanjutnya, Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 76,62% di tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 101,44% di tahun 2024. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan vokasi semakin baik, tetapi juga mencerminkan tingginya permintaan akan tenaga kerja terampil di sektor pertanian. Pencapaian lebih dari 100% ini menandakan bahwa lulusan tidak hanya mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, tetapi juga mampu menemukan peluang di luar yang ditargetkan.

Semua indikator menunjukkan tren positif. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengalami perubahan target, dengan nilai yang awalnya dari 34,56 pada tahun 2020 menjadi 34,25 pada tahun 2024 namun berubah padat tahun 2024 akhir menjadi Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP dengan target 77,96. Namun realisasi tahun 80,08. Ini menandakan keberhasilan dalam reformasi birokrasi. Dukungan Kebijakan dan strategi baru tetap harus dilakukan untuk mendorong reformasi birokrasi yang semakin baik.

Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP mengalami peningkatan signifikan, dari 75,85 di tahun 2020 menjadi 95,16 di tahun 2024. Peningkatan ini dikarenakan kegiatannya meningkat pada akhir tahun. Namun perhatian perlu dilakukan hingga akhir tahun untuk memastikan pengelolaan anggaran agar target tercapai.

Secara keseluruhan, BPPSDMP menunjukkan performa yang baik dalam beberapa indikator, seperti peningkatan kapasitas SDM dan lulusan yang diterima di sektor pertanian. Namun, tantangan signifikan tetap ada dalam penerapan teknologi, penilaian reformasi birokrasi, dan pengelolaan anggaran. Untuk mencapai target yang lebih ambisius di



masa depan, penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan strategi yang lebih terfokus dan berbasis data. Dengan langkah-langkah yang tepat, BPPSDMP dapat terus berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.

3. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada Tabel 14. Agar lebih mudah membandingkan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020-2022 dengan target 2023-2024, dilakukan proyeksi berdasarkan kecenderungan (trend) realisasi indikator kinerja. Perbandingan tersebut diprediksi bahwa target jangka menengah indikator kinerja akan dapat tercapai sampai dengan tahun 2024, kecuali untuk indikator kinerja anggaran. Jika mengikuti trend realisasi nilai kinerja anggaran, diprediksi target jangka menengah kemungkinan lebih sulit untuk tercapai sehingga harus diupayakan lebih keras. Namun, BPPSDMPP telah melakukan upaya upaya agar nilai kinerja anggaran dapat mencapai target. Hal ini terbukti dengan realisasi nilai kinerja anggaran yang mencapai target di tahun 2024.

Tabel 14. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020 - 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,19	75,51	80,83	85,22	90,24
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	99,50	79,92	90,88	88,98	97,50
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	76,62	85,94	84,46	88,55	91,30



4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	19,83	20,25	21,06	22,10
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	34,95	34,95	80,08
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,63	90,72	95,16

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam salah satu pointnya mewajibkan setiap Lembaga pemerintah menyampaikan laporan kinerjanya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja). Hal ini mengharuskan dilakukan benchmarking sebagai salah satu pertimbangan tempat pelaksanaannya adalah Lembaga tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan target output yang dicapainya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap menjadi Lembaga yang bisa dijadikan sebagai lokasi *benchmarking* tepatnya di badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDM) Kelautan dan Perikanan. Alasan BPPSDM Kelautan dan Perikanan sebagai pembanding dikarenakan rumpun kinerja hampir sama dimana ada penyuluhan dan juga Pendidikan.

Jika dilihat dari capaian BP2SDM Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2023 bahwasannya secara kumulatif total capaian rata-rata 109,67% dimana semua indikator mencapai target.



Ini menunjukkan capaian dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator dari Badan penyuluhan dan pengembangan Sumberdaya manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian pada tahun yang sama rata-rata capaian BPPSDMP 102,05%. Ini menunjukkan capaian BPPSDMP Kementerian pertanian lebih kecil sebesar 7,62 %. Hal ini menjelaskan juga bahwa capaian BPPSDMP Kementerian Pertanian berkategori sangat baik.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Capaian dari indikator kinerja Persentase petani yang menerapkan teknologi Tahun 2024 adalah 90,24% dari target 90%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,27%.

Pencapaian **21.709.099 petani (100,27%)** yang menerapkan teknologi sampai dengan Bulan Desember 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Hal ini, salah satunya berfungsi sebagai jembatan



pengetahuan antara petani dan teknologi, inovasi, serta praktik terbaik yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan penyebaran/diseminasi inovasi dan teknologi pertanian sebagai upaya membantu petani untuk memahami dan menerapkan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan mereka guna mendukung keberlanjutan, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran inovasi dan teknologi pertanian kepada petani. Sebagai jembatan antara penelitian dan praktik di lapangan, penyuluh berfungsi untuk mengkomunikasikan, mendidik, dan memotivasi petani agar dapat memahami, menerima, dan mengimplementasikan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Media yang digunakan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian sangat beragam, dari pertemuan kelompok tani hingga media digital modern. Pemilihan media yang tepat dengan mempertimbangkan aksesibilitas, preferensi, dan kemampuan petani untuk memahami informasi yang disampaikan. Dengan pemanfaatan media yang efektif, penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak petani, meningkatkan adopsi inovasi, dan mendorong kemajuan pertanian.

Penyuluh Pertanian juga sebagai agen perubahan yang memiliki peran multi- dimensi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Mereka tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan, tetapi juga mendampingi, membimbing, dan memotivasi petani untuk terus berinovasi dan meningkatkan usaha tani mereka. Dengan peran penyuluh yang efektif, program penyuluhan dapat mendorong produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan di sektor pertanian.



Dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja Penyuluh Pertanian, maka mereka diberikan bantuan operasional bagi penyuluh pertanian (BOP) selama 12 bulan. Salah satu hasil/keluaran kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Adapun jenis teknologi yang pada umumnya diterapkan oleh petani pada beberapa komoditas tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan), yaitu: penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, dan pemupukan berimbang. Sedangkan jenis teknologi yang diterapkan pada komoditas peternakan yaitu pengelolaan panen dan pasca panen serta pengelolaan OPT.

2. Fasilitasi Webinar Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani

Webinar menjadi alat penyuluhan yang sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta pelaku pertanian lainnya. Melalui webinar dapat mengatasi keterbatasan akses dan jarak, mendukung pembelajaran interaktif dan dua arah, serta tercapainya penyuluhan pertanian yang lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran. Selain itu, webinar juga menjadi sarana penting dalam membiasakan petani dan penyuluh menggunakan teknologi digital, yang semakin penting dalam ekosistem pertanian modern.

Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki kegiatan webinar yang diselenggarakan 2 kali setiap minggu, yaitu: hari Selasa dengan nama acara webinar "Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras)", dan hari Jumát dengan nama acara webinar "Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP)".



3. Fasilitasi Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Tematik Pertanian Organik

Kegiatan Sekolah Lapang (SL) merupakan program Kementan yang dilaksanakan di 42 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di 42 kabupaten dan 34 provinsi. Masing-masing BPP melibatkan 10 poktan dan diikuti minimal 3 orang pengurus/anggota dari masing-masing poktan.

Tujuan SL untuk meningkatkan kapasitas dari peserta dalam hal ini perwakilan dari pengurus poktan agar dapat menerapkan/mengimplementasikan penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian. Tema pembelajaran pada kegiatan SL Tahun 2024 yaitu pertanian organik agar para petani mampu memproduksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah secara mandiri. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis, menerapkan pertanian yang berkelanjutan, dan menjaga ketahanan pangan. Pelaksanaan SL dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan menerapkan prinsip *learning by doing*. Petani dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan sehingga bisa membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilannya, serta dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara peserta. Output dari kegiatan SL yaitu petani peserta SL meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terhadap materi yang diajarkan serta mereka dapat menerapkan teknologi pertanian organik.

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Persentase capaian dari indikator kinerja sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2024 adalah **97,50%**, dari target sebesar 90% dan realisasi sebesar **108,33%**.



Persentase realisasi capaian kinerja SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah Keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan didukung oleh:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya;

3. Prasarana dan Sarana pelatihan yang mendukung

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan;



4. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience.

Hambatan dan upaya penanggulangan dalam pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2024 diantaranya:

- a) Perubahan yang dinamis terhadap kebutuhan pelatihan pertanian belum sepenuhnya didukung oleh perubahan petunjuk pelaksanaan pelatihan. Upaya penanggulangannya adalah dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- b) Profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihannya masih perlu ditingkatkan, saat ini tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihan lainnya. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan profesionalisme secara individu/mandiri.
- c) Dukungan sarana pembelajaran belum sepenuhnya dapat menunjang pelatihan yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan PNBK dalam pemenuhan sarana pembelajaran.



c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase capaian dari indikator lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2024 adalah **91,30%**, dari target sebesar 90% dan realisasi sebesar **101,44%**.

Upaya yang dilakukan agar keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian tahun 2024 yang bekerja di bidang pertanian antara lain:

- a) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelakupertanian.
- b) Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktik, 30% teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan kompetensi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).
- c) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian.
- d) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha
- e) selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus.
- f) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)



di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri.

- g) Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja.
- h) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK-PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah memiliki jiwa cinta pertanian.

Faktor yang menjadi kendala pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain: 1) jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni, 2) Partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Selain itu dilakukan monitoring setiap akhir bulan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.



d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Upaya mewujudkan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP.

Capaian dari indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Tahun 2024 adalah **22,10% dari target 22%**, sehingga capaian kinerja sebesar **100,44%**.

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengupayakan berbagai kegiatan, antara lain:

A. Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi poktan dan gapoktan terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - a. Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - b. Struktur organisasi kelembagaan petani;
 - c. Telah memiliki kepengurusan yang mempunyai kegiatan usaha;
 - d. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - e. Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha;
 - f. Telah membangun kemitraan usaha;
 - g. Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha



- 2) Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi; Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi: Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - a. Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - b. Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - c. Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - d. Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.

B. Penyebarluasan/diseminasi informasi dan materi penyuluhan, salah satunya informasi penumbuhkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui media cyber extension dan berbagai media/kegiatan secara *offline* dan *online*.

C. Peningkatan sinergitas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam penumbuhkembangan KEP.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

1. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. Keterbatasan kemampuan Penyuluh Pertanian dalam penumbuhkembangan KEP karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dalam kegiatan dimaksud;
3. Keterbatasan akses sumber informasi dan teknologi, permodalan, pemasaran dan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani dan KEP;



4. Kelembagaan petani dan KEP pada umumnya belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
5. Pada umumnya pengelola/pengurus kelembagaan petani dan KEP belum memiliki kemampuan manajerial yang baik.

e. Presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP

Persentase capaian dari indikator Nilai reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2024 adalah 102,71%, dari target sebesar 77,96 dan realisasi sebesar 80,08. Penilaian PMPRB tahun 2024 menggunakan Hasil evaluasi rencana aksi RB general dan tematik BPPSDMP Tahun 2024.

Kedua pendekatan, RB General dan RB Tematik, memiliki peran yang saling melengkapi. RB General berfungsi sebagai dasar untuk membangun tata kelola birokrasi yang baik, sementara RB Tematik memberikan fokus pada isu-isu strategis yang mendukung pencapaian tujuan nasional. Agar lebih efektif, diperlukan sinergi antara keduanya dengan dukungan dari sistem digital yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun faktor-faktor yang menjadi masalah dan keberhasilan dalam capaian Nilai reformasi Birokrasi BPPSDMP tahun 2024.

A. Kendala dalam Penilaian Reformasi Birokrasi

- RB General
 1. Penilaian RB General sering kali terjebak pada pendekatan administratif yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen tanpa mempertimbangkan penguatan sinergi antar program. Hal ini mengakibatkan implementasi reformasi kurang memberikan dampak nyata.
 2. Kegiatan reformasi birokrasi sering kekurangan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time. Akibatnya, instansi



kesulitan mengukur progres atau dampak yang telah dicapai secara akurat.

3. Kebijakan dalam RB General sering terlalu teknis dan rigid, sehingga memperlambat proses implementasi, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur.
- RB Tematik
 1. Reformasi Birokrasi Tematik sering kali terlalu fokus pada isu tertentu, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem atau digitalisasi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap bidang lain. Pendekatan sektoral ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan reformasi.
 2. Penilaian RB Tematik membutuhkan data yang terperinci dan relevan, namun ketersediaan data sering kali menjadi kendala. Sistem data yang tidak terintegrasi memperburuk situasi, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi yang akurat.
 3. Dalam banyak kasus, tema RB Tematik yang ditetapkan di tingkat nasional sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di tingkat daerah, sehingga menimbulkan tantangan dalam implementasinya.
 4. RB Tematik sering kali menghadapi kendala dalam melibatkan masyarakat, sektor swasta, atau mitra pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi yang efektif dan strategi sosialisasi yang memadai.

B. Keberhasilan dalam Penilaian Reformasi Birokrasi

- RB General
 1. Pelaksanaan RB General berhasil meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini menciptakan tata kelola yang lebih baik di berbagai sektor.



2. RB General mendorong aparatur untuk mengadopsi pola pikir yang lebih berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, yang pada akhirnya memperkuat budaya kerja yang modern dan inovatif.
 3. Dengan adanya pedoman RB General, instansi memiliki kerangka kerja yang lebih jelas untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi, sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor.
 4. Beberapa instansi berhasil meningkatkan nilai indeks RB nasional, mencerminkan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- RB Tematik
 1. Pendekatan RB Tematik memungkinkan untuk fokus pada isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi, dengan hasil yang lebih terukur dan signifikan.
 2. RB Tematik mendorong kerja sama yang lebih intensif antara *stack holder*. Kolaborasi ini meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan reformasi.
 3. Program berbasis RB Tematik menghasilkan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 4. Pendekatan yang Fokus dan Berdampak Dengan tema yang spesifik, RB Tematik memastikan sumber daya digunakan secara optimal untuk menangani isu prioritas. Hal ini memberikan dampak yang lebih terasa di masyarakat.

f. Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Nilai)

Persentase capaian dari indikator Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2024 adalah **101,14%**, dari target sebesar 94,09% dan realisasi sebesar **95.16%**.



Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 mengatur *Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Tujuan utama IKPA adalah:

- Memperkuat prinsip *value for money* dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L);
 - Mendorong percepatan pelaksanaan anggaran dan pencapaian output yang terukur;
 - Mewujudkan perlakuan yang adil (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja di tingkat Satuan Kerja (Satker), Eselon I, dan K/L.
- Penilaian IKPA Tahun 2024 mencakup tiga aspek utama berikut:

4. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, meliputi:

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA

5. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, meliputi lima indikator:

- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

6. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang diukur melalui:

- Capaian Output

Penilaian IKPA Tahun 2024 mengalami reformulasi dengan beberapa perubahan signifikan, yaitu:

- Perubahan formula penilaian pada enam indikator, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA,



Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM.

- Peningkatan bobot indikator Deviasi Halaman III DIPA, dari sebelumnya 10% menjadi 15%.
- Penggunaan metode rata-rata tertimbang untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran, yang memperhitungkan proporsi pagu berdasarkan jenis belanja.
- Penambahan komponen Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual.
- Penilaian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP, dengan target penggunaan bertahap sebagai berikut:
 - Triwulan I: 1% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan,
 - Triwulan II: 5%,
 - Triwulan III: 9%,
 - Triwulan IV: 12,5%.
- Indikator Dispensasi SPM ditetapkan sebagai pengurang nilai IKPA di tingkat Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh Satker, Eselon I, dan K/L, sehingga mendukung kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.

Penilaian IKPA Tahun dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, mendorong capaian output yang optimal, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penerapan PMK No. 122/PMK.02/2020 tentang Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria perhitungan yang telah ditetapkan dalam PMK ini, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program-program strategis di sektor pertanian. Berikut adalah penerapannya secara detail:

1. **Realisasi Anggaran:** BPPSDMP harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sumber daya manusia pertanian dapat terserap secara efektif dan digunakan sesuai dengan rencana. Misalnya, dalam setiap program pelatihan atau penyuluhan, BPPSDMP harus memantau apakah dana yang diterima telah digunakan secara tepat pada setiap tahap kegiatan, mulai dari persiapan hingga evaluasi.
2. **Waktu Penyelesaian:** BPPSDMP perlu memastikan bahwa semua kegiatan, seperti pelatihan petani atau pengembangan materi pendidikan, diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan dapat menghambat penggunaan anggaran yang efektif dan menunda pencapaian tujuan program.
3. **Pembayaran Tepat Waktu:** Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program, BPPSDMP harus memastikan bahwa pembayaran untuk pihak ketiga, seperti pengelola pelatihan atau penyuluh, dilakukan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini akan menghindari keterlambatan pembayaran yang bisa mempengaruhi kelancaran program atau mengurangi efisiensi operasional.



4. **Capaian Output:** BPPSDMP perlu menilai capaian output dari setiap program yang dilaksanakan, seperti jumlah petani yang terlatih, jumlah materi penyuluhan yang dikembangkan, atau jumlah teknologi baru yang diadopsi. Output yang dihasilkan harus sesuai dengan anggaran yang digunakan, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat maksimal dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
5. **Rasio Output dan Outcome:** BPPSDMP harus mengevaluasi seberapa besar hasil (output) yang diperoleh dari penggunaan anggaran, dibandingkan dengan outcome jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan petani atau peningkatan adopsi teknologi pertanian. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas petani dan sektor pertanian secara keseluruhan.
6. **Pengendalian Pemborosan:** BPPSDMP perlu memantau dan mengendalikan pemborosan dalam setiap tahap penggunaan anggaran, mulai dari pengadaan bahan ajar hingga pelaksanaan kegiatan. Misalnya, penggunaan infrastruktur pelatihan seperti balai atau laboratorium harus dimaksimalkan untuk mendukung berbagai kegiatan sepanjang tahun, menghindari pemborosan sumber daya.

Melalui penerapan IKPA, BPPSDMP dapat melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan sumber daya dalam setiap program, serta memastikan bahwa anggaran dan sumber daya lainnya digunakan dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan cara ini, BPPSDMP dapat mencapai tujuan program dengan hasil yang maksimal, meminimalkan pemborosan, serta memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia pertanian di Indonesia.

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK Nomor



214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan berikut :

Rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%. Persentase capaian kinerja BPPSDMP tahun 2024 dalam hal efisiensi adalah mencapai -20%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$E = 0,38\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,38}{20} \times 50\right)$$

$$= 50\% + 0,94\%$$

$$= 50,94\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BPPSDMP pada tahun 2024 adalah 50,94%.

C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2024

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2024 adalah Rp.1.164.906.631.295,- dari pagu sebesar Rp.1.188.973.395.000,- Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2024 adalah 97,98%.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2024 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 143.297.729.793,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 289.768.877.766,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 433.291.319.205,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp.



298.538.704.531,-. Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2024 ditampilkan di tabel 15.

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN	146.129.703.000	143.297.729.793	98,06
2	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN	440.305.237.000	433.291.319.205	98,41
3	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN	296.897.394.000	289.778.877.766	97,60
4	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68
	TOTAL	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP tahun 2024

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2024 yang tertinggi adalah Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu 98,41%, sedangkan terendah adalah pada Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian yaitu 97,60%. Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 16.



Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2024

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	94.942.184.000	92.849.364.870	97,80%
2	DEKONSENTRASI	201.955.210.000	196.929.512.896	97,51%
Total		296.897.394.000	289.778.877.766	97,60%

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

Tabel 16 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2024 terbagi atas dua kewenangan yaitu kewenangan kantor pusat dalam hal ini Pusat Penyuluhan Pertanian dan Dekonsentrasi. Tahun 2024 realisasi tertinggi anggaran kewenangan Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 97,80% dan realisasi terendah Dekonstrasi (DK) yaitu 97,51%.

2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan

Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2024

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	86.771.777.000	85.237.117.805	98,23
2	UPT PELATIHAN	59.357.926.000	58.060.611.988	97,81
Total		146.129.703.000	143.297.729.793	98,06

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

Berdasarkan Tabel 17 terlihat bahwa Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) mencapai realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 98,23% dari UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD) sebesar 97,81%.



3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2024

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	51.904.617.000	50.963.078.375	98,19
2	UPT PENDIDIKAN	388.400.620.000	382.328.240.830	98,44
	TOTAL	440.305.237.000	433.291.319.205	98,41

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2024 paling tinggi di UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD) yaitu 98,44% yang lebih rendah realisasi anggaran di Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 98,19%.

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara rinci ditampilkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen
Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2024

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	71.362.565.000	67.774.362.572	94,97
2	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	13.012.890.000	12.974.644.873	99,71
3	UPT PELATIHAN	101.803.756.000	99.837.477.195	98,07
4	UPT PENDIDIKAN	119.461.850.000	117.952.219.891	98,74
	Total	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68



Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2024

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2024 yang tertinggi adalah UPT Pendidikan/ Kantor Daerah (KD) yaitu 99,71%, sedangkan yang terendah adalah Sekretariat BPPSDMP yaitu 94,97%.

D. Kinerja lainnya

PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) KALIMANTAN SELATAN - TAHUN 2024

Sektor pertanian memainkan peran krusial dalam menopang ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian, pemerintah daerah telah menginisiasi tiga program utama, yaitu:

- **Optimasi Lahan (OPLAH):** Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang belum tergarap secara maksimal. Dengan pendekatan yang tepat, lahan-lahan potensial yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembangkan menjadi lahan subur yang menghasilkan panen melimpah.
- **Pompanisasi:** Salah satu tantangan terbesar dalam pertanian adalah ketersediaan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Melalui program ini, pemanfaatan pompa air difokuskan untuk memperluas cakupan irigasi sehingga meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami.
- **Padi Gogo:** Untuk mengantisipasi keterbatasan lahan sawah, pengembangan budidaya padi gogo di lahan kering menjadi strategi alternatif guna memastikan ketahanan pangan di daerah yang memiliki curah hujan terbatas.



Ketiga program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan.

Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan program OPLAH, POMPANISASI, serta PADI GOGO di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan:

No	Kabupaten/ Kota	OPLAH Target (Ha)	OPLAH Realisasi (Ha)	POMPANI SASI Target (Ha)	POMPANI SASI Realisasi (Ha)	PADI GOGO Target (Ha)	PADI GOGO Realisasi (Ha)	TOTAL TARGET (Ha)	TOTAL REALISASI (Ha)	CAPAIAN (%)
1	Kota Banjarmasin	140,00	140,00	100,00	415,00	0,00	0,00	240,00	555,00	231,25
2	Hulu Sungai Selatan	1.073,00	457,00	235,00	1.532,00	287,00	0,00	1.595,00	1.989,00	124,70
3	Hulu Sungai Utara	1.500,00	1.838,50	0,00	19,00	0,00	0,00	1.500,00	1.857,50	123,83
4	Tanah Laut	16.541,00	16.464,00	4.746,00	9.071,00	436,00	140,20	21.723,00	25.675,20	118,19
5	Kota Banjarbaru	0,00	0,00	253,00	263,00	0,00	0,00	253,00	263,00	103,95
6	Banjar	0,00	0,00	4.000,00	4.027,00	305,00	407,00	4.305,00	4.434,00	103,00
7	Balangan	1.284,00	1.284,00	920,00	920,00	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	100,00
8	Hulu Sungai Tengah	1.850,00	1.607,00	497,00	576,00	155,00	0,00	2.502,00	2.183,00	87,25
9	Tabalong	0,00	0,00	577,00	655,00	186,00	0,00	763,00	655,00	85,85
10	Barito Kuala	18.191,00	16.367,00	500,00	459,50	973,00	6,00	19.664,00	16.832,50	85,60
11	Tanah Bumbu	0,00	0,00	5.842,00	3.661,05	1.313,00	250,00	7.155,00	3.911,05	54,66
12	Tapin	1.250,00	396,00	4.968,00	2.547,00	0,00	0,00	6.218,00	2.943,00	47,33
13	Kotabaru	0,00	0,00	795,00	78,00	1.912,00	2,00	2.707,00	80,00	2,96

Kabupaten/Kota dengan Capaian di Atas Target:

- Kota Banjarmasin (231,25%)
- Hulu Sungai Selatan (124,70%)
- Hulu Sungai Utara (123,83%)
- Tanah Laut (118,19%)

Capaian yang melampaui target ini menunjukkan efektivitas implementasi program serta tingginya partisipasi petani di daerah tersebut.

Kabupaten/Kota dengan Capaian di Bawah Target (<50%):

- Tanah Bumbu (54,66%)
- Tapin (47,33%)
- Kotabaru (2,96%)

Kabupaten Kotabaru memiliki capaian terendah, hanya 2,96% dari total target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan



serius dalam implementasi program yang perlu segera diatasi dengan strategi yang lebih tepat.

Beberapa faktor utama yang menghambat pencapaian target program di antaranya:

1. Faktor Cuaca: Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kesulitan dalam pengolahan lahan serta irigasi, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap curah hujan.
2. Ketersediaan Air: Sumber air yang kurang stabil di beberapa daerah menjadi tantangan dalam implementasi program pompanisasi.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan pompa air masih belum merata di semua wilayah.
4. Minat Petani yang Masih Rendah: Budidaya padi gogo belum sepenuhnya diminati oleh petani karena dianggap memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan metode pertanian tradisional.

Untuk meningkatkan efektivitas program ke depan, beberapa langkah strategis dapat diterapkan, antara lain:

1. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
 - Meningkatkan pengawasan dan pelaporan realisasi program secara berkala guna memastikan ketercapaian target yang lebih baik.
2. Peningkatan Infrastruktur Pendukung
 - Perluasan jaringan irigasi serta penyediaan fasilitas pompanisasi tambahan untuk memastikan ketersediaan air bagi petani.
3. Pelatihan dan Pendampingan Petani
 - Mengadakan pelatihan serta pendampingan bagi petani agar lebih memahami manfaat dan teknik budidaya padi gogo serta teknologi pertanian modern.



4. Penguatan Koordinasi Antar Instansi

- Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kelompok tani guna meningkatkan efektivitas implementasi program.

Secara keseluruhan, capaian realisasi program mencapai 89,77% dari total target yang telah ditetapkan. Beberapa kabupaten/kota berhasil melampaui target, namun ada beberapa wilayah yang masih menghadapi tantangan signifikan. Evaluasi mendalam serta perbaikan strategi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan capaian program di masa mendatang.



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2024. Sasaran program BPPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2024 adalah :

1. Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2024 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **100,27%**; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **108,33%**; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu **101,44%**; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar **100,44%**; e) Presentase capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggungjawab BPPSDMP yaitu **102,71%**; dan f) Nilai IKPA BPPSDMP yaitu 101,14%.
2. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2024 adalah Rp.1.164.906.631.295,- dari pagu sebesar Rp.1.188.973.395.000,- Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2024 adalah 97,98%. Jika dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 143.297.729.793,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 289.768.877.766,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 433.291.319.205,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 298.538.704.531,-.



LANGKAH DIMASA MENDATANG YANG AKAN DILAKSANAKAN ORGANISASI UNTUK MENINGKATAN KINERJANYA

A. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian.
- 2) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian
- 3) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/ *online*.
- 4) Penyebar luasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) dengan alokasi pembiayaan Dana melalui Dekonsentrasi;
- 5) Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; c) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
- 6) Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 7) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi



- B. Upaya dalam kegiatan pembentukan KEP yang akan dilakukan kedepan adalah: 1) Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP; 2) Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya; 3) Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi; dan 4) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian tetap membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
- C. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah:
- 1) Pusat pelatihan pertanian akan membuat SOP pelaporan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan Pertanian sehingga data yang tersaji didalam laporan kinerja akan sama antara Pusat pelatihan dan UPT Pelatihan;
 - 2) Pusat pelatihan pertanian akan menyusun manual perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2023 untuk memudahkan dan menyamakan cara menyusun capaian IKSK antar UPT;
 - 3) Pusat Pelatihan Pertanian akan mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pelaporan capaian kinerja Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan.



D. Dalam rangka mencapai sasaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2024, maka upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan serta menyusun *time schedule* pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dalam rangka peningkatan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan secara utuh Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan DUDI;
- 2) Menjalin kerja sama yang menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan user (pengguna) lulusan yaitu Lembaga Pemerintah, Perusahaan BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta dan lembaga kewirausahaan. Kerja sama yang erat bisa berupa program magang, kunjungan studi, stadium general atau karya ilmiah;
- 3) Lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran terhadap lulusannya untuk memudahkan lembaga pendidikan mendeteksi keterpakaian lulusannya;
- 4) Penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara alumni dan pihak sekolah. Sosial media ini bila perlu dikelola oleh pihak sekolah yang memiliki peran humas (Hubungan Masyarakat). Bentuk penggunaan media misalnya membuat grup Facebook yang memberi kesempatan berbagai alumni dan mahasiswa dan siswa berinteraksi dan meng-update info lowongan kerja dan tip-tip sukses di dunia kerja;
- 5) Menumbuhkan program kewirausahaan bagi mahasiswa dan siswa melalui program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).



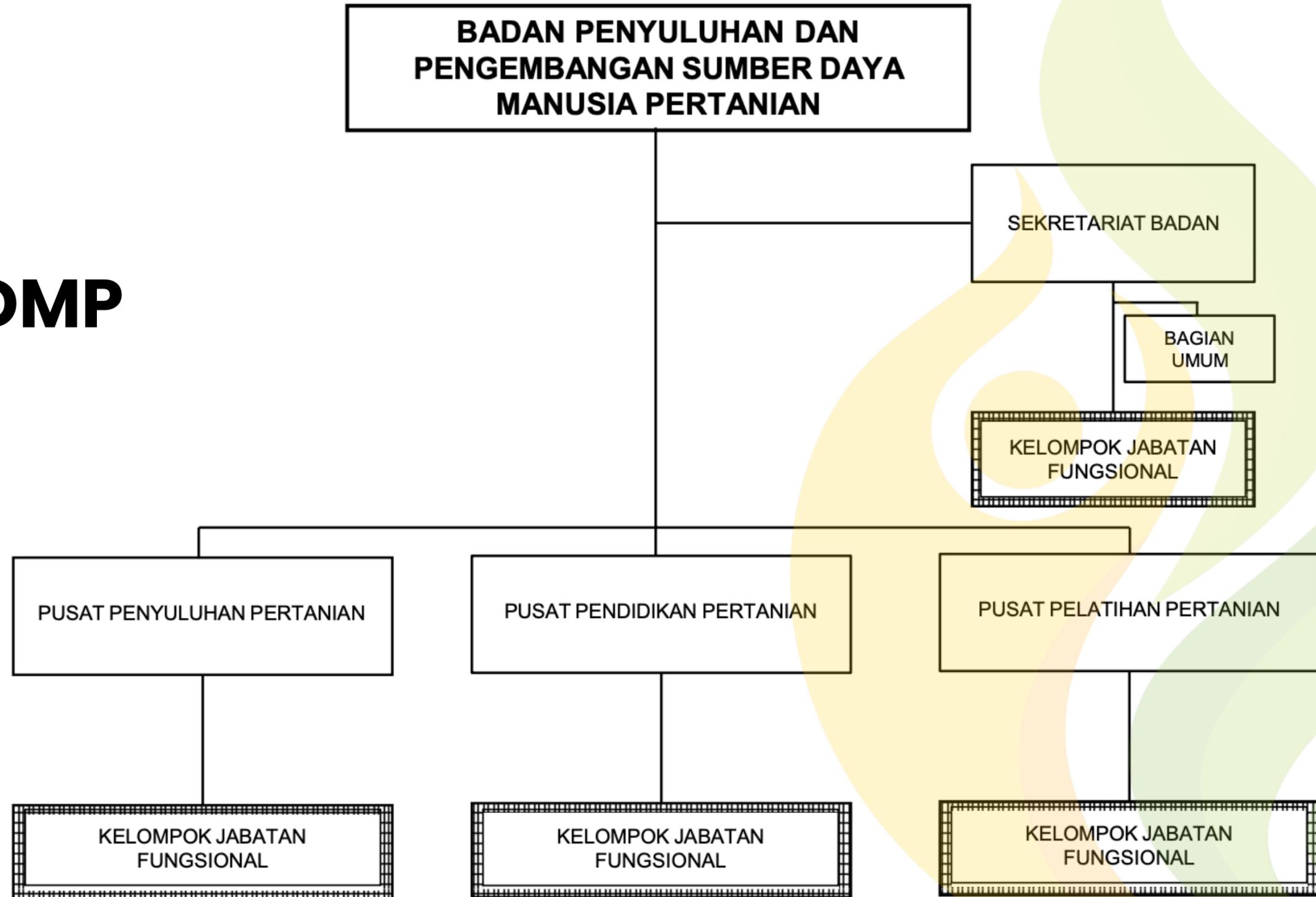
- E. Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang untuk meningkatkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan PPSDMP tahun 2023.
- 1) Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 2) Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP;
 - 3) Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian.
- F. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BPPSDMP di tahun mendatang maka Sekretariat Badan PPSDMP akan melakukan upaya sebagai berikut :
- a. Secara rutin menyelenggarakan Bimtek SAKTI per semester setiap tahunnya, yang didukung dengan pemantauan dan pembinaan secara intensif dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
 - b. Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
 - c. Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SAKTI, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Perlu memaksimalkan ketercapaian Rincian Output (RO) dengan adanya efisiensi biaya;
 - e. Mendorong peningkatan Nilai Kinerja satker terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.

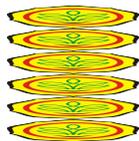


LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PPSDMP





DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Per Desember 2024

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	0	1	1
2	Sekretariat Badan	49	55	104
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	27	30	57
4	Pusat Pendidikan Pertanian	15	15	30
5	Pusat Pelatihan Pertanian	16	16	32
6	Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	65	38	103
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	38	41	79
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	65	43	108
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	102	84	186
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	78	47	125
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	62	42	104
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	36	35	71
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	47	39	86
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	39	17	56
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	38	24	62
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	34	36	70
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	41	25	66
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	25	15	40
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	28	23	51
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	39	26	65
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	32	21	53
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	42	28	70
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	29	19	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	27	12	39
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	30	10	40
TOTAL PEGAWAI BPPSDMP		1.004	742	1.746

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kepegawaian/
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.
NIP. 197607142002121002



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Per Desember 2024**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	30	47	-	-	6	-	-	17	1	1	104
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	5	23	22	-	-	2	-	-	5	-	-	57
4	Pusat Pendidikan Pertanian	2	13	8	-	-	4	-	1	2	-	-	30
5	Pusat Pelatihan Pertanian	3	16	8	-	-	2	-	-	3	-	-	32
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	6	24	21	-	-	3	1	-	29	11	8	103
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	11	34	17	3	-	5	-	-	9	-	-	79
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	18	34	16	7	-	4	-	-	19	4	6	108
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	23	67	40	19	-	8	-	-	26	3	-	186
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	26	36	19	11	-	8	-	-	25	-	-	125
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	16	50	20	16	-	1	-	-	1	-	-	104
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	7	25	22	8	-	6	-	-	-	-	3	71
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	3	41	24	2	-	4	-	-	12	-	-	86
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	2	22	17	2	-	4	-	-	3	1	5	56
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	7	28	10	7	-	2	-	-	7	-	1	62
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	4	27	20	8	-	4	-	-	5	1	1	70
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	29	22	-	-	1	-	-	12	2	-	66
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	1	18	6	2	-	4	-	-	7	2	-	40
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	20	14	3	-	3	-	-	9	-	2	51
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	25	17	7	-	1	-	-	13	1	1	65
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	1	22	16	-	-	4	-	-	9	1	-	53
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	1	24	24	5	-	2	-	-	13	-	1	70
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	20	9	3	-	4	-	-	11	1	-	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	1	13	12	7	-	3	-	-	3	-	-	39
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	8	19	7	2	-	4	-	-	-	-	-	40
TOTAL		148	660	438	112	-	89	1	1	240	28	29	1.746

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kepegawaian/
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.
NIP. 197607142002121002



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
Per Desember 2024**

No	Unit Kerja	Golongan																			Jml		
		I				Total	II				Total	III				Total	IV					Total	
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d			e
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	-	1	-	5	3	9	15	26	10	26	77	14	3	-	1	-	18	104
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8	5	14	29	7	9	2	4	4	26	57
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	3	4	12	21	4	1	1	-	-	6	30
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	10	20	9	2	-	-	-	11	32
6	Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	-	-	10	6	6	4	26	18	18	12	11	59	8	3	5	1	1	18	103
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	9	24	10	23	66	5	2	-	-	-	7	79
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	-	-	-	3	3	5	5	4	7	21	12	17	10	25	64	11	5	1	2	1	20	108
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	-	-	-	2	2	-	3	3	12	18	23	28	20	58	129	25	7	5	-	-	37	186
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	-	-	-	-	-	3	3	4	11	21	14	20	16	34	84	9	7	4	-	-	20	125
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	25	15	27	82	8	7	5	1	-	21	104
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	-	-	-	2	2	1	-	-	6	7	10	16	9	17	52	8	2	-	-	-	10	71
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	12	8	15	23	58	8	7	3	1	1	20	86
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	-	-	-	5	-	4	1	10	9	2	8	12	31	7	4	1	1	2	15	56
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	11	9	7	11	38	7	4	4	1	-	16	62
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	6	9	14	19	48	5	6	5	-	1	17	70
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	10	17	7	9	43	6	5	3	-	-	14	66
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	7	8	7	4	26	2	3	2	-	-	7	40
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	-	-	3	-	-	6	9	10	6	9	6	31	5	4	1	-	1	11	51
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	2	2	-	-	1	9	10	6	8	10	16	40	5	3	4	-	1	13	65
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	-	-	-	-	8	2	10	4	7	12	10	33	5	2	1	-	2	10	53
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	13	13	11	14	51	7	5	2	-	-	14	70
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	7	10	6	8	31	4	4	1	-	-	9	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	7	3	8	10	28	4	2	-	-	-	6	39
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9	6	3	9	27	5	3	1	2	-	11	40
TOTAL		-	-	-	9	9	33	22	60	96	211	235	296	229	408	1.168	178	100	51	15	14	358	1.746

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kepegawaian/
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.
NIP. 197607142002121002

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP TA 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
18.10.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98%
I	018.10.DL. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	883.332.334.000	866.367.926.764	98,08%
A	1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	146.129.703.000	143.297.729.793	98,06%
B	5892 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	440.305.237.000	433.291.319.205	98,41%
C	1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	296.897.394.000	289.778.877.766	97,60%
II	018.10.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%
C	1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
18.10.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98%
A	ESELON II PUSLATAN	247.933.459.000	243.135.206.988	98,06%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.DL)	86.771.777.000	85.237.117.805	98,23%
2	UPT PELATIHAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.DL)	59.357.926.000	58.060.611.988	97,81%
3	UPT PELATIHAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.WA)	101.803.756.000	99.837.477.195	98,07%
B	ESELON II PUSDIKTAN	572.779.977.000	564.218.183.969	98,51%
1	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.DL)	51.904.617.000	50.963.078.375	98,19%
2	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.WA)	13.012.890.000	12.974.644.873	99,71%
3	UPT PENDIDIKAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.DL)	388.400.620.000	382.328.240.830	98,44%
4	UPT PENDIDIKAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.WA)	119.461.850.000	117.952.219.891	98,74%
C	ESELON II PUSLUHTAN	296.897.394.000	289.778.877.766	97,60%
1	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN (PROGRAM 018.10.DL)	94.942.184.000	92.849.364.870	97,80%
2	DEKONSENTRASI (PROGRAM 018.10.DL)	201.955.210.000	196.929.512.896	97,51%
D	ESELON II SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	71.362.565.000	67.774.362.572	94,97%
1	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	71.362.565.000	67.774.362.572	94,97%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SATER / UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
18.10.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98%
I	018.10.DL. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	883.332.334.000	866.367.926.764	98,08%
A	1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	146.129.703.000	143.297.729.793	98,06%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	86.771.777.000	85.237.117.805	98,23%
2	UPT PELATIHAN	59.357.926.000	58.060.611.988	97,81%
B	5892 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	440.305.237.000	433.291.319.205	98,41%
1	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	51.904.617.000	50.963.078.375	98,19%
2	UPT PENDIDIKAN	388.400.620.000	382.328.240.830	98,44%
C	1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	296.897.394.000	289.778.877.766	97,60%
1	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	94.942.184.000	92.849.364.870	97,80%
2	DEKONSENTRASI	201.955.210.000	196.929.512.896	97,51%
II	018.10.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%
A	1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%
1	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	71.362.565.000	67.774.362.572	94,97%
2	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	13.012.890.000	12.974.644.873	99,71%
3	UPT PELATIHAN	101.803.756.000	99.837.477.195	98,07%
4	UPT PENDIDIKAN	119.461.850.000	117.952.219.891	98,74%

*/ Realisasi OMSPAN s.d. 31 Desember 2024 (update 15012025)

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP TA 2024 (Revisi ke-14 DIPA BPPSDMP)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
18.10.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98%
I	018.10.DL. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	883.332.334.000	866.367.926.764	98,08%
A	1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	146.129.703.000	143.297.729.793	98,06%
1	412069 BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (PUSLATAN)	86.771.777.000	85.237.117.805	98,23%
2	120040 BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	2.719.820.000	2.701.180.513	99,31%
3	237200 BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP) CIAWI	5.172.103.000	5.167.254.762	99,91%
4	239640 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	4.440.745.000	4.364.610.866	98,29%
5	239654 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	8.169.968.000	8.167.990.284	99,98%
6	239661 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	8.421.113.000	8.386.900.710	99,59%
7	239675 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	7.535.412.000	7.529.763.134	99,93%
8	239701 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	7.882.579.000	7.850.178.754	99,59%
9	394771 BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	3.213.281.000	3.086.151.483	96,04%
10	412075 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	5.672.188.000	5.528.009.168	97,46%
11	412081 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	6.130.717.000	5.278.572.314	86,10%
B	5892 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	440.305.237.000	433.291.319.205	98,41%
1	412069 BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (PUSDIKTAN)	51.904.617.000	50.963.078.375	98,19%
2	412005 POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	9.717.000.000	9.616.991.055	98,97%
3	417402 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	72.457.128.000	72.075.533.058	99,47%
4	417405 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	17.036.765.000	16.852.255.023	98,92%
5	417407 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	21.157.204.000	21.030.526.904	99,40%
6	417409 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	83.643.910.000	79.929.178.493	95,56%
7	417411 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	22.032.629.000	21.799.089.133	98,94%
8	417413 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	63.485.704.000	62.756.145.874	98,85%
9	417428 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	43.046.515.000	42.911.293.749	99,69%
10	237814 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	10.526.636.000	10.448.703.576	99,26%
11	237924 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	40.515.887.000	40.176.295.865	99,16%
12	412101 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	4.781.242.000	4.732.228.100	98,97%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
C	1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	296.897.394.000	289.778.877.766	97,60%
1	412069 Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (PUSLUHTAN)	94.942.184.000	92.849.364.870	97,80%
2	019071 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	527.752.000	499.287.968	94,61%
3	029175 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	11.933.696.000	11.856.476.000	99,35%
4	049062 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.674.560.000	1.659.532.790	99,10%
5	050040 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	14.407.401.000	14.216.492.009	98,67%
6	099436 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	3.533.632.000	3.348.967.944	94,77%
7	140042 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	4.378.220.000	4.152.240.620	94,84%
8	169065 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	3.411.668.000	3.317.529.522	97,24%
9	229030 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	2.570.072.000	2.561.097.979	99,65%
10	239224 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.834.636.000	6.749.286.356	98,75%
11	280031 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	3.280.056.000	3.079.395.000	93,88%
12	305143 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.378.880.000	1.378.560.000	99,98%
13	339059 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	2.306.780.000	2.306.780.000	100,00%
14	345105 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	3.059.108.000	2.878.982.000	94,11%
15	403450 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	4.230.692.000	4.132.310.000	97,67%
16	403452 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	4.857.803.000	4.807.283.000	98,96%
17	403455 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	2.804.354.000	2.776.123.134	98,99%
18	403457 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	11.741.392.000	10.859.627.328	92,49%
19	403458 Dinas Pertanian Provinsi Maluku	4.189.046.000	4.006.400.800	95,64%
20	417675 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	1.219.766.000	1.162.353.446	95,29%
21	417996 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara	5.538.912.000	5.462.377.209	98,62%
22	417998 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh	12.223.320.000	12.021.683.694	98,35%
23	417999 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	11.212.106.000	11.195.403.064	99,85%
24	418000 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	5.944.630.000	5.744.215.630	96,63%
25	418009 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	7.532.164.000	7.374.751.361	97,91%
26	418010 Dinas Pertanian Provinsi Banten	2.704.778.000	2.684.508.000	99,25%
27	418011 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	14.474.896.000	14.266.104.877	98,56%
28	418013 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	5.414.702.000	5.263.021.245	97,20%
29	418014 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	6.032.660.000	5.898.603.178	97,78%
30	418018 Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	2.942.672.000	2.923.486.060	99,35%
31	418019 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	383.506.000	381.896.000	99,58%
32	418020 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	6.063.224.000	6.045.179.182	99,70%
33	418021 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	17.770.568.000	17.343.164.950	97,59%
34	418022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	6.824.264.000	6.793.460.550	99,55%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) */	%
35	418024 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	3.967.832.000	3.728.260.000	93,96%
36	690852 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	1.441.282.000	1.163.788.000	80,75%
37	690853 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	1.100.152.000	1.006.114.000	91,45%
38	690854 DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	1.139.608.000	1.092.470.000	95,86%
39	690855 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	904.420.000	792.300.000	87,60%
II	018.10.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%
A	1813 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP	305.641.061.000	298.538.704.531	97,68%
1	412069 BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (SEKRETARIAT BADAN PPSDMP)	71.362.565.000	67.774.362.572	94,97%
2	412069 BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (PUSDIKTAN)	13.012.890.000	12.974.644.873	99,71%
3	120040 BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	6.971.408.000	6.919.473.979	99,26%
4	237200 BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP) CIAWI	21.009.280.000	20.039.454.127	95,38%
5	239640 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	5.950.326.000	5.868.438.849	98,62%
6	239654 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	10.188.935.000	10.167.339.961	99,79%
7	239661 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	11.951.453.000	11.942.815.952	99,93%
8	239675 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	10.776.488.000	10.578.172.571	98,16%
9	239701 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	11.506.486.000	11.314.998.545	98,34%
10	394771 BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	8.414.163.000	8.005.379.105	95,14%
11	412075 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	7.935.776.000	7.914.844.293	99,74%
12	412081 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	7.099.441.000	7.086.559.813	99,82%
13	412005 POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	7.842.121.000	7.685.732.985	98,01%
14	417402 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	16.095.940.000	15.972.592.918	99,23%
15	417405 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	10.912.067.000	10.870.793.516	99,62%
16	417407 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	10.834.656.000	10.658.818.476	98,38%
17	417409 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	16.996.906.000	16.520.791.669	97,20%
18	417411 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	9.850.143.000	9.817.700.181	99,67%
19	417413 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	13.075.625.000	13.043.593.705	99,76%
20	417428 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	10.854.837.000	10.776.237.759	99,28%
21	237814 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	9.119.365.000	8.795.674.349	96,45%
22	237924 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	7.513.513.000	7.455.844.120	99,23%
23	412101 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	6.366.677.000	6.354.440.213	99,81%

*/ Realisasi OMSPAN s.d. 31 Desember 2024 (update 15012025)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Idha Widi Arsanti
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

30 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andi Amran Sulaiman


Idha Widi Arsanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Sasaran Program		Indikator	Target	
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1-1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	90	%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	1-2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	90	%
		2-2	Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	90	%
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	3-1	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	22	%
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	4-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP	77.96	%
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	5-1	Nilai IKPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	94.09	Nilai

I. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi

Anggaran

KEGIATAN

1. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihann Pertanian	Rp.	146.129.703.000
2. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhann Pertanian	Rp.	296.897.394.000
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp.	440.305.237.000

II. Program Dukungan Manajemen

KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp.	305.641.061.000
--	-----	-----------------

TOTAL

Rp. 1.188.973.395.000

30 Desember 2024

Menteri Pertanian,

Kepala Badan,

Andi Amran Sulaiman


Idha Widi Arsanti

**REALISASI PESERTA PELATIHAN YANG MENGIKUTI DAN
MENERAPKAN PELATIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUP PUSAT
PELATIHAN PERTANAIAN**

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	Persentase (%)
1	BBPMKP Ciawi	2.880	2.867	99,55
2	BBPKH Cinagara	2.563	2.480	96,76
3	BBPP Lembang	2.307	2.287	99,13
4	BBPP Ketindan	5.484	5.484	100
5	BBPP Batu	2.106	2.087	99,15
6	BBPP Batangkaluku	9.343	9.000	96,33
7	BBPP Binuang	1.171	1.090	93,08
8	BBPP Kupang	1.390	1.295	93,17
9	Bapeltan Jambi	801	786	98,13
10	Bapeltan Lampung	791	740	93,55
TOTAL		28.836	28.116	97,50

CAPAIAN IKU BPPSDMP - PENDIDIKAN 2024

Jumlah Lulusan Yang Bekerja di Sektor Pertanian													
No	Instansi	Jumlah Lulusan 2023 (TOTAL)		Realisasi							Total Lulusan Yang Bekerja di Sektor Pertanian	Persentase Lulusan Yang Bekerja di Sektor Pertanian	Langkah-Langkah Percepatan / Keterangan
				Bekerja di Pemerintahan (RPL)	Bekerja di Pemerintahan (PNS/THL/dll)	Bekerja di Sektor Pertanian Swasta	Berwirausaha Pertanian	Melanjutkan Studi	Bekerja di luar Sektor Pertanian	Belum Bekerja			
1	Polbangtan Medan	340	Org	138	5	110	55	1	5	26	309	90,88%	Tercapai
2	Polbangtan Bogor	550	Org	319	8	132	36	3	20	32	498	90,55%	Tercapai
3	Polbangtan Yoma (Yogyakarta)	440	Org	271	21	81	31	2	34	0	406	92,27%	Tercapai
4	Polbangtan Yoma (Magelang)	151	Org	13	17	51	55	0	8	7	136	90,07%	Tercapai
5	Polbangtan Malang	446	Org	211	16	164	17	4	11	20	408	91,48%	Tercapai
6	Polbangtan Gowa	491	Org	235	8	25	147	32	10	33	447	91,04%	Tercapai
7	Polbangtan Manokwari	193	Org	97	6	7	64	0	9	10	174	90,16%	Tercapai
8	PEPI	70	Org	0	9	41	9	4	5	2	63	90,00%	Tercapai
9	SMK-PP Sembawa	150	Org	0	0	31	31	75	3	10	137	91,33%	Tercapai
10	SMK-PP Banjarbaru	60	Org	0	4	8	13	33	2	-	58	96,67%	Tercapai
11	SMK-PP Kupang	63	Org	0	0	1	22	38	1	1	61	96,83%	Tercapai
		2.954		1.284	94	651	480	192	108	141	2.697	91,30%	

HASIL PERHITUNGAN PENULAIAN CNRB BADAN PPSDMP TAHUN 2024

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024				% CNRB	Realisasi	
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian	Capaian 2024			Bobot Capaian
	BPPSDMP			45	35,084	102,71	36,035	77,96%	80,08
1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	1 - 5	3	4	2,4	3,662	2,9296	Cascade	102,71
2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	0 - 100	76	4	3,04	84,07	3,3628	Cascade	
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	0 - 100	89,5	2	1,79	95,16	1,9032	Cascade	
4	Capaian IKU	0 - 100	95	7	5,054	102,22	6,0155	Cascade	
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	85	4	3,4	100	4	Cascade	
6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	0 - 100	80	4	3,2	68,8	2,752	Cascade	
7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	0 - 100	78	10	7,8	66,3	6,63	Cascade	
8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	0 - 100	90	8	7,2	93,52	7,4816	Cascade	
9	Pengentasan Kemiskinan			2	1,2	0,96	0,96		



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01810	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	Nilai	99.58	90.29	97.64	95.57	99.55	97.71	93.39	95.66	100%	0.50	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	13.54	19.53	9.56	9.96	9.77	23.35				
			Nilai Aspek	94.94		97.62				93.39				

PERHITUNGAN NILAI EFISIENSI BADAN PPSDMP TAHUN 2024

No.	KRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	RO	TVRO	RVRO	Realisasi/Target	CRO/ KRO	Alokasi x capaian	(alokasixcapaian)-realisasi
1	1810.SCC. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	42.557.815.000	41.384.928.347	001. Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur (Orang)	2.629	2.474	1,063	106%	45.224.129.198	3.839.200.851
				002. Pelatihan pertanian bagi non aparatur (Orang)	15.466	16.117				
				003. Pelatihan pertanian bagi non aparatur (MP Food Estate) (Orang)	360	360				
2	1810.PDI. Sertifikasi Profesi dan SDM (PN)	1.821.091.000	1.790.633.509	U01. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)	682	679	0,996	100%	1.813.080.336	22.446.827
3	1810.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	75.570.330.000	74.236.136.316	001. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani (Kelompok Masyarakat)	1.691	1.691	1	100%	75.570.330.000	1.334.193.684
4	1810.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PN)	3.463.163.000	3.445.709.326	001. Penumbuhan dan Penguatan P4S (Lembaga)	100	99	0,990	99%	3.428.531.370	-17.177.956
5	1810.AEA. Koordinasi	7.839.288.000	7.766.648.906	001. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan (Kegiatan)	62	62	1	100%	7.839.288.000	72.639.094
6	1810.AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11.201.447.000	11.000.981.489	001. Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian (NSPK)	6	6	1	100%	11.201.447.000	200.465.511
7	1810.CAG. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.676.569.000	3.672.691.900	001. Sarana Pelatihan Pertanian (Unit)	10	10	1	100%	3.676.569.000	3.877.100
8	1812.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	264.566.150.000	259.700.167.783	001. Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian (Orang)	38.831	38.449	0,990	99%	261.963.480.244	2.263.312.461
9	1812.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	8.541.958.000	8.487.865.311	001. Percontohan penerapan Teknologi Pertanian (Kelompok Masyarakat)	420	376	1,117	112%	9.541.548.830	1.053.683.519
				002. Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	9	5				
				004. Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani (Kelompok Masyarakat)	5	5				
10	1812.BDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.222.444.000	3.076.652.211	001. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi (Paket)	6	4	0,667	67%	2.148.296.000	-928.356.211
11	1812.AEA. Koordinasi	13.778.800.000	11.923.239.555	001. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan (Kegiatan)	6	6	1	100%	13.778.800.000	1.855.560.445
12	1812.FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6.788.042.000	6.590.952.906	001. Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi (Daerah)	38	38	1	100%	6.788.042.000	197.089.094
				002. Koordinasi Kegiatan SIMURP (Daerah)	1	1				
13	5892.SAC. Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	163.450.357.000	161.413.293.867	001. Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (Orang)	4.476	4.443	1,007	101%	164.664.370.455	3.251.076.588
				002. Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma III (Orang)	925	851				
				003. Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian (Orang)	1.209	998				
				004. Penyetaraan Penyuluh SMA ke D-IV (Orang)	643	522				

14	5892.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	177.381.380.000	173.819.608.266	001. Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani (Orang)	60.000	52.607	0,877	88%	155.525.037.628	-18.294.570.638
15	5892.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	5.915.000.000	5.798.004.667	001. Wirausahawan Muda Pertanian (Kelompok Masyarakat)	169	169	1	100%	5.915.000.000	116.995.333
16	5892.AEA. Koordinasi	9.060.889.000	8.871.229.417	001. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, movev dan pelaporan Pendidikan Vokasi Pertanian (Kegiatan)	12	12	1	100%	9.060.889.000	189.659.583
17	5892.PEA. Koordinasi (PN)	35.970.864.000	35.202.798.504	001. Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) (Kegiatan)	1	1	1	100%	35.970.864.000	768.065.496
18	5892.AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12.000.000.000	11.880.828.508	001. Peraturan/norma/pedoman pendidikan pertanian (NSPK)	6	7	1	117%	14.000.000.000	2.119.171.492
19	5892.CAA. Sarana Bidang Pendidikan	3.069.320.000	3.050.898.536	001. Sarana Pendidikan Vokasi Pertanian (Paket)	11	11	1	100%	3.069.320.000	18.421.464
20	5892.CBI. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	201.000.000	200.944.000	001. Prasarana Pendidikan Menengah untuk SMK-PP	1	1	1	100%	201.000.000	56.000
21	5892.CBJ. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	33.256.427.000	33.053.713.440	001. Prasarana Pendidikan Polbangtan	4	4	1	100%	33.256.427.000	202.713.560
22	1813.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	23.037.430.000	21.282.912.850	952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	7	7	1	100%	23.037.430.000	1.754.517.150
				953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	21	21				
				051 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	3	3				
23	1813.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	256.580.774.000	252.390.619.043	957. Layanan Hukum (Layanan)	1	1	1	100%	256.580.774.000	4.190.154.957
				958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	6	6				
				960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	1				
				962. Layanan Umum (Layanan)	2	2				
				994. Layanan Perkantoran (Layanan)	22	22				
24	1813.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9.143.471.000	8.865.690.000	001. Layanan Sarana Internal (Unit)	3	3	1	100%	9.143.471.000	277.781.000
25	1813.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	16.879.386.000	15.999.482.638	001. Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	200	200	1	100%	16.879.386.000	879.903.362
				002. Pelatihan bagi CPNS dan/atau Aparatur	125	321				
		1.188.973.395.000	1.164.906.631.295							4.490.976.403

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

Efisiensi 0,38%

Nilai Efisiensi 50,94%

0,94%